

Format Usulan Program RAN OGI 2023-2024

INSTITUSI PENGUSUL: SEKNAS FITRA		
KATEGORI USULAN: Baru		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri - Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah; Kementerian Dalam Negeri Ditjen Keuda 2. Pemerintah Daerah (Pemda) terlampir di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Selatan b) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Judul Komitmen:	:	Mendorong keterbukaan dokumen perencanaan dan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sulawesi Selatan.
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	<p>Keterbukaan informasi public menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan good governance. Keterbukaan Informasi public sudah dijalankan selama kurun waktu 12 tahun di Indonesia, seiring dengan ditetapkannya Undang-undang keterbukaan informasi public (UU KIP) no14/2008. Dengan dasar regulasi ini masyarakat memiliki hak untuk dapat mengakses informasi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.</p> <p>Namun hingga saat ini keterbukaan informasi khususnya terkait dengan keterbukaan dokumen perencanaan dan anggaran belum terpublikasikan secara umum oleh pemerintah daerah.</p> <p>Masih banyak pemerintah daerah yang mempublikasikan keterbukaan dokumen perencanaan dan anggarannya hanya sebatas pada lampiran I (Ringkasan APBD) dan Lampiran II (ringkasan apbd yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi). Tak hanya itu untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masih banyak daerah yang hanya mempublikasikan berupa ringkasan DPA saja, belum berupa rincian DPA.</p> <p>Padahal sebagaimana diketahui dokumen perencanaan dan anggaran merupakan dokumen public yang sudah seharusnya terpublikasikan secara luas tanpa harus melalui permohonan akses dokumen, dan terinformasikan baik melalui website pemerintah daerah.</p> <p>Akibatnya masyarakat menjadi kesulitan untuk memantau pagu dan realisasi penggunaan anggaran pada program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.</p> <p>Menimbang hal tersebut, gagasan keterbukaan terkait keterbukaan dokumen publik perencanaan dan anggaran</p>

		perlu didorong untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran dan belanja pemerintah daerah.
Apa bentuk komitmennya	:	Mendorong keterbukaan dokumen perencanaan dan anggaran yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	Dengan keterbukaan dokumen perencanaan dan anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan dan langkah yang ditempuh oleh pemerintah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dan pada tingkat pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program dan kegiatan yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai Keterbukaan informasi yakni transparansi dan akuntabel terkait dokumen perencanaan dan anggaran pemerintah. keterbukaan transparansi informasi yang akurat, kredibel dan detail, memang merupakan suatu hak untuk diperoleh oleh masyarakat mengenai pemerintahan baik itu kementerian, lembaga maupun badan public
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Komitmen ini sejalan dengan upaya pencapaian SDGs khususnya tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh; Pada indikator 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan target 16.10 yang menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Tak hanya itu, komitmen ini juga untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2020-2024 khususnya dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola untuk mendukung terwujudnya dan terlaksananya konsep satu data yang terintegrasi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.
Penerima Manfaat	:	1.Akademisi 2.Kelompok Masyarakat Sipil 3.Jurnalis 4.Stakeholder lainnya
Informasi Tambahan	:	Adanya perencanaan mengenai aksi mengenai integrasi perencanaan dan penganggaran pada stranas PK di tahun selanjutnya.
Sumber Dana Pengusul:	:	Ford Foundation

Indikator Capaian dengan Target Terukur	:	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1) Mendorong kesesuaian format dokumen perencanaan dan anggaran beserta jenis dokumen yang akan dipublikasikan. Adapun jenis dokumen utama yang didorong untuk dipublikasikan adalah APBD (lampiran I, Lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V), DPA rincian Belanja Berdasarkan Dinas		Januari 2023	Desember 2024
2) Mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan dokumen perencanaan dan anggaran secara lengkap, pada kanal pemerintah daerah yang saling terintegrasi dan update		Januari 2023	Desember 2024
3) Mendorong efektivitas kanal informasi data dokumen perencanaan dan anggaran dengan mensosialisasikannya ke masyarakat dan mendorong masyarakat untuk secara bersama – sama melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran		Januari 2023	Desember 2024
Informasi Kontak :			

Nama PIC dari K/L atau OMSPengusul	:	a) K/L terkait : Kementerian Dalam Negeri Ditjen Keuangan Daerah b) Seknas FITRA : Eryvn Kaffah c) YASMIB Sulawesi: Rosniaty Aziz
Departemen / Jabatan	:	Seknas FITRA YASMIB Sulawesi
Email	:	ekaffah@seknasfitra.org
Nomor Handphone	:	Eryvn Kaffah : 0812-3727-818